

ARF Working Group Co-chair Meeting



*Menyikapi Kendala Pembangunan Rumah Bagi
Korban Tsunami*



LAPORAN BULANAN
ARF CO-CHAIR MEETING
PEBRUARI 2007



Aceh Recovery Forum

Ideas for Better Aceh

Jalan Peurada Utama No. 111, Kampung Pineung, Banda Aceh
Phone. 0651-7410400 Website: <http://www.acehrecoveryforum.org>
email: helpdesk@Acehrecoveryforum.org

didukung sepenuhnya oleh:

DANIDA

www.um.dk/en

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	2
Pendahuluan	3
Tujuan	4
Hasil Kegiatan	4
Tindak Lanjut	4
Kesimpulan dan Rekomendasi	4
Notulensi Co-chair Meeting 12 Pebruari 2007	5
Notulensi Co-chair Meeting 28 Pebruari 2007	16
Lampiran-lampiran	17
Verifikasi Lapangan Tim ARF Sektor Perumahan	17
Bahan Audiensi untuk Tim Pansus DPRA: Permasalahan dan Harapan Civil Society Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Korban Tsunami	22
Matrik Indikator Keberhasilan Kegiatan	27

PROGRAM

The holding of meetings among its members to discuss future directions for the recovery

PROJECT

ARF co chair meeting, **PEBRUARI 2007**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Topik pembahasan Co-Chair Meeting bulan Pebruari ini adalah masalah perumahan dan pertanahan. Masalah perumahan menjadi sangat krusial dibicarakan mengingat tahun 2007 adalah tahun ketiga masa kerja BRR di Aceh. Hasil verifikasi ARF menunjukkan bahwa dari 128.000 rumah yang dibutuhkan, hanya 51.000 rumah yang berhasil dibangun hingga Januari 2007. Sementara itu, BRR telah menargetkan bahwa bulan Juli akan memindahkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di barak ke rumah-rumah maupun ke rumah sementara. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 14.300 keluarga yang masih tinggal di barak dengan total seluruhnya mencapai 43.000 jiwa lebih. Menyadari lambannya proses pembangunan rumah yang ada, BRR kemudian mengevaluasi targetnya dan menanggukannya sampai akhir tahun 2007.

Masalah perumahan mulai ramai dipermasalahakan banyak kalangan di berbagai kesempatan maupun di media massa, terutama para pengungsi korban tsunami. Oleh karena itu, kelompok kerja (Pokja) ARF perlu mengetahui masalah sebenarnya tentang pembangunan rumah korban tsunami serta mencari solusi dan memberikan rekomendasi kepada para pihak yang berwenang dalam hal ini. Dari hasil diskusi, Co-chair sepakat bahwa perlu dilakukan verifikasi intensif, terhadap data kebutuhan rumah, pembangunan rumah, dan permasalahan yang ada. Co-chair berpendapat bahwa ARF harus memiliki data yang valid dan reliable sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Beberapa permasalahan perumahan yang menjadi kesimpulan awal adalah:

1. Adanya simpang siur data perumahan,
2. Problem perumahan di atas tanah masyarakat
3. Problem rumah yang dibangun satu persatu dan dibangun dengan cluster
4. Mekanisme pencairan keuangan
5. Mekanisme sanksi terhadap kontraktor/NGO dan petugas BRR nakal
6. Tanah rumah kepada penyewa
7. Yang bertanggung jawab terhadap rumah yang tidak ada komitmen
8. Follow up terhadap 5 kebijakan BRR tentang perumahan
9. Complain mechanism yang diterapkan BRR
10. Keterkaitan village planning dengan pelaksanaan pembangunan perumahan

LAPORAN KEGIATAN

Bentuk Kegiatan

Diskusi

Nama Kegiatan

ARF Co-Chair Meeting

Topik

Menyikapi Kendala Pembangunan Rumah Bagi Korban Tsunami

Hari/Tanggal

Senin dan Rabu, 16 dan 28 Pebruari 2007

Pukul

19:30 wib – selesai

Peserta

Total peserta untuk dua pertemuan 25 orang. Rata-rata 12 orang dalam satu kali diskusi, terdiri dari pimpinan kelompok kerja ARF bidang perumahan/infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perdamaian, serta manajemen ARF dan wartawan Aceh Magazine.

PENDAHULUAN

Diskusi *co-chair* ARF bulan ini dilatarbelakangi oleh perbedaan yang signifikan tentang jumlah pembangunan rumah yang dipublikasikan BRR dengan hasil verifikasi ARF. Diskusi juga menyoroti pencapaian target pembangunan rumah BRR yang selalu di bawah target. Seperti misalnya target pembangunan rumah tahun 2005 sebesar 32.000 unit, tetapi yang realisasi hanya 16.200 unit (54%). Target pembangunan rumah tahun 2006 sebesar 78.000 unit, namun yang terealisasi hanya 34.841 unit rumah (45%). Sementara untuk tahun 2007, BRR kembali menargetkan akan menyelesaikan seluruh rumah bagi pengungsi, sehingga tidak ada lagi penghuni Barak di akhir tahun ini. Selain itu, sampai awal 2007, BRR menyatakan di berbagai media massa dan dimasukkan dalam laporan setahun dan dua tahun BRR, bahwa jumlah rumah yang sudah dibangun sebesar 74 ribu. Padahal verifikasi data mentah per 5 Januari yang bersumber dari Pusat Data BRR, diolah oleh ARF ternyata hanya 51.041 unit.

Berdasarkan verifikasi ARF terhadap rumah bantuan bagi korban tsunami di Banda Aceh dan Aceh Besar, Co-chair Pokja ARF berpendapat bahwa data pembangunan rumah sangat simpang siur, masalah juga terjadi karena terdapat bangunan rumah bantuan di atas tanah masyarakat, adanya masalah rumah yang dibangun satu persatu dan dibangun dengan cluster, adanya masalah dalam mekanisme pencairan keuangan bantuan perumahan di BRR, mekanisme sanksi terhadap kontraktor/NGO dan petugas BRR nakal belum berjalan efektif, permasalahan tanah dan rumah kepada korban yang dulunya berstatus penyewa, tanggung jawab terhadap kebutuhan rumah di desa-desa yang belum memiliki donor, follow up terhadap 5 kebijakan BRR tentang perumahan, *complain mechanism* masalah perumahan yang diterapkan BRR, serta keterkaitan *village planning* dengan pelaksanaan pembangunan perumahan.

Co-chair meeting ini merupakan salah satu bentuk kegiatan Aceh Recovery Forum (ARF) yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses rehab rekon Aceh. Untuk menjaga kesinambungan, eksistensi dan kontribusi kelompok kerja ARF dalam rehab dan rekon Aceh, maka dilakukanlah diskusi reguler dengan topik-topik terkini seputar rehab rekon Aceh. Pada bulan Pebruari ini, permasalahan yang dibicarakan adalah seputar pembangunan rumah yang dinilai banyak kalangan lambat. Topik ini juga merupakan amanat dari hasil diskusi yang dilakukan pada bulan Januari yang lalu.

TUJUAN

1. Meberikan up date informasi bagi para co-chair ARF sekaligus mencari solusi tentang masalah lambatnya pembangunan rumah bagi korban gempa dan tsunami.
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dan masukan masyarakat sipil terhadap pembangunan Aceh baru yang lebih baik.
3. Sebagai diskusi awal untuk menyusun draft usulan masyarakat sipil Aceh terhadap pembangunan perumahan bagi korban gempa dan tsunami.

HASIL KEGIATAN

1. Terdapat sepuluh ide awal sementara yang perlu ditindaklanjuti menyangkut masalah perumahan dan pertanahan bagi korban gempa dan tsunami di Aceh.
2. Perlunya kegiatan tindak lanjut dalam bentuk audiensi kepada pengambil kebijakan dan publikasi mengenai informasi komprehensif tentang masalah pembangunan perumahan di media massa.
3. Tercapainya kesepakatan bersama tentang kelanjutan co-chair meeting ini di masa yang akan datang.

TINDAK LANJUT

Seluruh peserta rapat sepakat untuk bertemu kembali di awal Bulan Maret untuk menyempurnakan draft pokok-pokok pikiran masyarakat terhadap masalah pembangunan perumahan bagi korban gempa dan tsunami di Aceh. Pokja ARF meminta staf ARF untuk menyiapkan final draft dan menyusun jadwal pertemuan dengan BRR dan pejabat Pemda terkait.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pertemuan co-chair ARF bulan Pebruari 2007 ini dapat dikatakan sangat produktif. Selain mampu memeng-*up date* informasi kepada seluruh co-chair tentang permasalahan pembangunan perumahan, juga menghasilkan gagasan dan pemikiran yang komprehensif untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini kepada para pengambil kebijakan. Hasil pertemuan bulan ini merekomendasikan untuk melakukan pengecekan data ulang, cross check data, serta upaya-upaya advokasi kepada pengambil kebijakan tentang permasalahan perumahan ini.

NOTULENSI

Topik
Menyikapi Kendala Pembangunan Rumah Bagi Korban Tsunami

Hari/Tanggal
Selasa, 12 Pebruari 2007

Pukul
19:30 wib – selesai

Tempat
Restoran Bunda

Peserta
Fahmi (Pokja Infrastruktur dan Perumahan), Jasman J. Ma'ruf, (Pokja Ekonomi), Yusuf Aziz, Nurjannah (Pokja Pendidikan), Mohd. Daud Yoesoef (Pokja Perdamaian), Jeliteng Pribadi, Catur Wibowo, Renny Wahyuni, Lisa Novianty (ARF), Murizal Hamzah dan Eky (Aceh Magazine)

Acara dibuka oleh **Jeliteng Pribadi**, Manajer Operasional ARF

Assalamualaikum Wr.Wb...Syukur Alhamdulillah kita panjatkan bersama-sama atas kehadiran Allah SWT, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir batin sehingga kita dapat berkumpul untuk mendiskusikan permasalahan perumahan bagi korban tsunami yang telah diniatkan sejak 2 minggu yang lalu. Kita sudah tuangkan ide tentang topik yang akan didiskusikan pada malam ini dalam TOR yang baru saja diberikan, mohon maaf terlambat diberikan seharusnya TOR ini diberikan bersama dengan undangan. Intinya yang ingin kita bahas disini adalah apa yang dijanjikan BRR sejak tahun 2005 sampai 2006 hingga kini belum terbukti, jadi janji-janji BRR untuk membangun rumah bagi korban tsunami masih jauh panggang dari api. Kita liat tahun 2005, dari 32.000 unit rumah yang ditargetkan selesai hanya 16.200 unit yang berhasil direalisasi. Kemudian pada tahun 2006, BRR kembali menarget akan membangun 78.000 unit namun yang terealisasi hanya 57.174 unit rumah. Inipun hanya angka rekapitulasi, jadi data ditahun 2005 plus angka ditahun 2006. Lebih parah lagi ternyata angka-angka ini sewaktu kita bandingkan dengan data-data yang kita kumpulkan yang kita breakdown dari data yang masuk ke BRR ternyata jumlah yang sudah selesai hingga januari 2007 hanya 48.284, jadi jauh sekali dari apa yang dikatakan BRR sebanyak 57.174 unit rumah telah selesai dibangun. Jika angka-angka ini muncul kepada orang-orang seperti Akhiruddin yang sangat kritis, ini dijadikan lagi wahana untuk menohok BRR, mengatakan bahwa BRR telah melakukan pembohongan public. Yaitu dengan mengatakan bahwa jumlah rumah yang telah dibangun berjumlah 57 ribu lebih, padahal kenyataannya hanya 48.000 minus kurang lebih 10.000. Jadi sungguh suatu fenomena/fakta yang membuat kita miris melihat kenyataan ini. Dalam beberapa kesempatan yang kita saksikan atau yang kita baca dalam setiap presentasi BRR atau kutipan dari media-media, Pak Kuntoro sering kali mengatakan keterlambatan pembangunan rumah disebabkan oleh 4 hal yang utama yaitu masalah pertanahan, sulitnya mencari tanah bagi pembangunan rumah korban tsunami, yang kedua permasalahan distribusi logistik pengantar material, juga permasalahan pasokan materialnya, kalo dulu permasalahan karena kayu, kemudian saat ini berkembang lagi masalah batu bata, dan seterusnya, terakhir Pak Kuntoro pernah mengatakan kesulitan minimnya tenaga kerja, yaitu tukang-tukang, dalam beberapa observasi dilapangan kita sering melihat banyak sekali pengangguran-pengangguran dibarak-barak pengungsian yang tidak memiliki akses kedalam pasar tenaga kerja, sepertinya ada missing link disini, ada yang hilang antara apa yang dikatakan oleh BRR dengan kenyataan dilapangan. Menyangkut masalah kayu, pernah dalam suatu workshop yang dilaksanakan oleh Walhi bekerja sama dengan BRR, kurang lebih bulan oktober tahun 2006 yang lalu, menyatakan bahwa ternyata kayu sitaan hasil illegal logging yang ditangkap melampaui kebutuhan rehab rekon Aceh. Pada saat itu kita

langsung mengirimkan pesan melalui sms kepada Sekretariat Dewan Pengarah untuk membatalkan pemberian ijin kewenangan HPH dengan alasan jumlah kayu tanggapan ternyata melampaui kebutuhan rehab dan rekon di Aceh. Inilah beberapa hal yang ingin kita diskusikan.

Lihat Data Perumahan Per Januari 2007
(Reny membagikan data verifikasi perumahan ARF)

Dari pernyataan BRR yang menyatakan sebanyak 57 ribu unit ternyata 9 ribu unit lagi itu tidak benar datanya. Dan data ini pun masih belum valid, setelah saya buka data detailnya ternyata di Singkil tidak terlihat ada rumah yang dibangun oleh IOM. Yang ada hanya dari BRR, Yayasan peduli bangsa, Muslim Aid kemudian Caritas, tidak ada lagi dari yang lain. Padahal pada saat saya ke Singkil bulan oktober yang lalu, IOM berkomitmen akan membangun 138 unit di desa kilangan, namun hanya 10 unit yang telah selesai sedangkan sisanya tidak dikerjakan, setelah kita melakukan wawancara kepada masyarakat dan pihak IOM, mereka mengatakan bahwa kendala mereka dimaterialnyanya, balok-balok cor untuk tiang didatangkan dari Banda Aceh dan Meulaboh. Karena terlambat ini, kemudian jepang (JICA) menarik kembali bantuannya sehingga mereka kesulitan pendanaannya. Setelah saya kembali dari Singkil dan kita follow up kembali kepada IOM, mereka mengatakan bahwa mereka lagi mencari funding. Dan beberapa saat kemudian kita hubungi kembali dan ternyata mereka sudah menemukan funding yaitu dari Americares. LSM dari Amerika. Setelah itu mereka melanjutkan kembali pembangunan rumah di Singkil dan sampai saat ini sudah 20 unit rumah yang selesai. Ini menunjukkan bahwa data dari BRR tidak valid benar. Kita masih butuh waktu untuk melakukan kroscek kepada LSM-LSM yang bersangkutan apakah report ini benar adanya atau tidak. Apakah Bang Bowo sudah melakukan cross cek ?

Catur Wibowo :

Belum. Tadi saya ke Tibang untuk melihat progress pembangunan rumah disana, ternyata sejak tahun 2005 rumah yang akan dibangun oleh BRR sebanyak 30 unit namun hingga sekarang baru 25 unit rumah yang selesai, itupun mutunya tidak sesuai sehingga masyarakat memilih untuk menetap dibarak-barak.

Jeliteng Pribadi

Ini faktanya. Jika kita melihat laporan-laporan di media massa mengenai BRR rata-rata menunjukkan berita miring, jarang sekali berita memuji. Seperti yang kita dapatkan dari harian Global.com tanggal 1 februari 2007 yang lalu, "Rumah bantuan BRR terbengkalai", jadi rata-rata berita yang kita kutip di media massa semuanya menunjukkan permasalahan proyek pembangunan rumah yang dilakukan oleh BRR. Berita lainnya "Kuntoro menggiring BRR dengan strategi percepatan baru" ini berita tanggal 31 Januari yang lalu. Kuntoro mengakui bahwasannya kendala mereka adalah pada kapasitas *personnya* khususnya di internal BRR. Kemudian berita lainnya "15% proyek rumah ditelantarkan" dari Kompas 31 januari 2007. Semua berita tentang rumah-rumah BRR rata-rata menunjukkan permasalahan, sedikit sekali yang memuji tentang keberhasilan pembangunan perumahan. Inilah fakta-fakta yang bisa kami angkat untuk memancing bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan pemikiran, koreksi terhadap data atau masukan dari permasalahan yang ada. Demikian pengantar dari saya. Silahkan diskusi ini kita mulai.

Fahmi:

Saya kira yang paling penting untuk diketahui bahwa data-data BRR adalah data menunggu, jadi BRR tidak punya petugas untuk menjemput data. Biasanya hasil yang dikirimkan ke BRR dalam format yang sudah BRR tentukan, tapi kebanyakan NGO mengirimnya dengan formatnya sendiri, sehingga BRR menurut saya cenderung untuk mengabaikan yang bukan formatnya sendiri akibatnya BRR memiliki data yang tidak kongkret. Kedua, BRR merupakan lembaga besar yang sangat sering bermain dengan data, sehingga bukan mustahil BRR menyulap beberapa data didalamnya. Angka-angka kebutuhan rumah ini juga saya belum yakin bahwa jumlahnya hanya segini, karena pengalaman menunjukkan bahwa dari tahu ketahun angka kebutuhan meningkat, jadi tidak ada acuan di BRR sebenarnya kebutuhan yang bagaimana yang mereka sebut sebagai kebutuhan. Sekarang banyak permintaan agar BRR membangun rumah per KK bukan menurut jumlah rumah yang rusak. dibeberapa Kabupaten hal ini diakomodir sebagai kebutuhan rumah, di Pidie misalnya ada beberapa Kecamatan yang mengajukan KK sebagai data kebutuhan rumah, oleh karena itu mungkin angka disini 10.942 bisa jadi angka yang sudah mengakomodir KK sebagai satuan yang harus dibangun rumah, atau bisa juga data sebelumnya. Kita belum tau akan hal itu dan saya kira ARF perlu mencari tau angka yang ada ini apakah angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kebutuhannya BRR. Saya kira itu dulu.

Jeliteng Pribadi

Terima kasih. Ada yang lain, Pak Daud barang kali ada komentar tentang data-data dari BRR, atau tanggapan dari kendala-kendala yang sudah kita paparkan.

Mohd. Daud Yoesoef

Kalau kita melihat data kebutuhan tahun 2005, seharusnya sekarang ini total kebutuhan sudah berkurang tapi ini meningkat.

Catur Wibowo

Boleh saya tambahkan sedikit, hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, seperti misalnya pecah KK sehingga kebutuhan rumah cenderung terus meningkat.

Fahmi

Kalo kita lihat di Banda Aceh kebutuhan rumah 18.834 unit, sedangkan total yang sedang diproses saja hampir 33 ribu, angka ini hampir 2 kali lipat dari total kebutuhan.

M. Yusuf Aziz

Saya melihat semula jumlah kebutuhan fokusnya hanya pada korban pemilik, tapi ada kebijakan baru dari BRR bahwa penyewa juga akan dibantu. Jumlah penyewa ini sangat elastis, tak terukur berapa orang. Dikoran-koran BRR membuka iklan bahwa bagi siapa saja penyewa silahkan mendaftar, dan ini bukan tidak mungkin orang-orang yang bukan korban juga mendaftar. Hal itu menjadi salah satu penyebab yang membuat BRR kelabakan, dan BRR tidak ada keberanian untuk menetapkan secara pasti. Menurut saya harusnya ada prioritas, sehingga semua orang tidak minta rumah. Jika hal ini terus terjadi maka orang-orang yang benar-benar korban tidak akan tertangani secara baik.

Mengenai permasalahan BRR mungkin kalo tahap awal masalah bahan baku maupun akses bisa kita terima, tapi kalo sudah bertahun-tahun masih itu juga menjadi alasan tidak bisa kita terima. Kita melihat apakah alasan ini sebagai kompensasi tidak bisa melakukan sesuatu. Biasanya seperti itu, karena tidak bisa membuat sesuatu yang bagus sehingga kompensasi dijustifikasi menjadi sesuatu yang populer. Soal KK saya sepakat bahwa BRR tidak mempunyai tim memadai dalam hal pendataan, jadi kalo kita ingin membantu, kita bisa terjunkan tim agar data tentang perumahan bisa betul-betul akurat. Perasaan saya mengatakan pihak NGO sudah mulai agak sungkan membangun rumah, karena banyak rumah yang mereka bangun tidak dihuni. Kita jangan jauh-jauh, Unsyiah dibantu beberapa ratus rumah, diantaranya bantuan dari Islamic Relief. Namun kita telah ditegur oleh mereka, karena ada akal-akalan dari sipemilik rumah dengan menggantungkan gorden agar tidak ketahuan kalau rumah tidak berpenghuni, tapi mereka terus memantau dan ternyata rumah tersebut memang benar tidak ada pengguninya. Jadi itu juga yang membuat kita bertanya kembali apakah benar jumlah rumah yang dibutuhkan sekian banyak, apakah benar ini menjadi kebutuhan atau hanya menjadi harapan-harapan. Akibatnya ini menjadi masalah. Disamping itu juga mengenai kredibilitas teman-teman yang berkerja menangani perumahan, saya pikir kedepan akan semakin sulit, tadi sore saya berbicara dengan salah satu kontraktor. Menurut mereka saat ini yang menjadi broker perumahan adalah dari KPA. Yang penting ada uang maka akan mendapatkan rumah. Entah rumah dari mana kita tidak tahu. Hal ini akan menjadi masalah kedepan bahkan kontraktor dari luar juga akan mogok. Jika kita adalah lembaga normatif kita harus tahu bagaimana caranya mengakuratkan data sehingga jika kita kritisi, kita kan berinjak dengan sebuah format yang pasti, sehingga kita tidak terjebak dari elastisitas data yang dikembangkan oleh BRR. Ini yang harus kita pegang teguh. Kalo dari awal jumlah kebutuhan rumah sebanyak 125.000 unit maka coba kita analisis dari data itu saja dulu. Sebab kalo tidak kita akan kelabakan.

Jeliteng Pribadi:

Terima kasih Pak Yusuf, tadi Fahmi telah menyorot masalah kualitas data, ternyata data-data yang dipaparkan pun jika ditinjau dari kenyataan dilapangan bisa jadi tidak sebanyak ini yang dibutuhkan sehingga kita tidak tahu mana yang benar. Ada indikasi rumah bantuan banyak yang kosong namun barak-barak pengungsian masih juga penuh, tidak perlu jauh-jauh barak di Lhong Raya sampai saat ini masih juga penuh. Nah.. bagaimana pendapat Pak Jasman.

Jasman J Ma'ruf

Kalau saya melihat di data jumlah komitmen 103 ribu unit rumah, dimana BRR 16 ribu unit dan NGO 87 ribu unit, tapi ketika pelaksanaannya baik di in proses maupun di complete datanya jauh lebih besar, contohnya NGO berkomitmen membangun 87 ribu unit rumah, sementara jika kita tambahkan di in proses maupun di complete, jumlahnya sudah seratus lebih. Itu maknanya melampaui, makanya semakin dicurigai lagi, apa mungkin, atau dimana silapnya, kata kuncinya memang didata ini. Saya bertambah-tambah heran ketika pegawai BRR saat ini ada 1054 orang, kalo satu orang saja diletakkan disetiap kabupaten dia bisa tahu persis berapa sebenarnya jumlah rumah dan siapa yang membangunnya. Sehingga bisa memperoleh data yang pasti. Orang ini harus pro aktif, dia harus tahu kondisi dilapangan yang sebenarnya. Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data yang benar. Baik buruknya hasil tergantung dari baik buruknya data. Karena data merupakan bahan baku dalam mengambil keputusan. Karena itu data base amat sangat

penting bagi BRR. Saya terkejut melihat komitmen BRR hanya 16 ribu, kemudian melihat process dan completeness-nya sekian, jika dibandingkan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh non BRR jumlahnya begitu besar, hampir berkali-kali banyaknya. Padahal jumlah orang yang bekerja di BRR sangat banyak, jika kita pikir Deputi BRR kerjanya ngapain aja. Ini jadi bertambah-tambah masalah. Kuntoro sendiri terus menerus bicara mengenai perumahan, perumahan dianggap sebagai pekerjaan pokok baginya, tapi kalo datanya seperti ini semakin muak lagi kita dibuatnya. Jadi kata kuncinya adalah data, saya sering dengar orang memecahkan KK, maknanya apa, makna sebenarnya adalah hal yang tidak wajar namun saat ini bisa dibenarkan oleh siapa saja. Pokoknya siapa saja masyarakat yang butuh rumah bisa mendapatkannya. Jadi itu masalahnya, kalau masalah ini belum clear sampai kapanpun masalah rumah tidak akan selesai. Jadi yang harus dilakukan adalah, bila ada yang pihak yang menipu masukan ke dalam koran. Kalau selama ini yang terjadi hanya sebatas isu saja kalau memiliki rumah ganda akan ditangkap. Jadi kita harus tindak tegas. Bawa ke pengadilan dan buktikan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Jeliteng Pribadi:

Terima kasih banyak Pak Jasman, memang sungguh memprihatinkan kedua hal ini. Dari kualitas data yang kita peroleh dan data-data yang kita printkan dalam bentuk kabupaten ini. Jadi dari pihak BRR sendiri, mereka tidak mempunyai data seperti ini.

Jasman J Ma'ruf :

Seharusnya mereka mempunyai data seperti ini. Bahkan mereka harus memiliki di tiap kecamatan. Jadi BRR buat peta. Dan seharusnya mereka mempunyai itu sejak awal.

Jeliteng Pribadi:

Jadi mereka tidak melakukan rekap setiap informasi yang masuk dari NGO seperti yang dikatakan pak Yusuf tadi. Jadi sungguh memprihatinkan hal seperti ini. Tadi Pak Jasman mengungkapkan tentang fakta di lapangan tentang adanya mark up, manipulasi terhadap kebutuhan rumah. Dan ini memang harus kita tindak lanjuti. Kita suarakan supaya Pemerintah dapat mengambil tindakan tegas. Mungkin ada lagi dari Bu Nurjannah

Nurjannah :

Assalamualaikum. Dari tadi kita bicara mengoreksi BRR dan segala macam, tapi saya pikir, diawal-awal alasan BRR tidak mengambil tenaga kerja dari pengungsi yang duduk di barak seperti yang tadi pak Jeliteng katakan, saya ingin mengingatkan kalau orang Aceh ini bukan orang pekerja. Jadi kita-kita itu orang manja. Sehingga kita tidak dapat menyalahkan orang, ada salahnya juga orang Aceh. Sehingga banyak kontraktor-kontraktor yang kadang-kadang tidak mau menggunakan orang Aceh. Kalau orang Jawa atau Medan, kerjanya sungguh-sungguh. Pagi sampai sore. Kalau orang Aceh kerjanya sudah tidak disiplin juga banyak liburnya. Ada acara Maulid, sunat anak tetanggalah, kenduri. Jadi 1 minggu bisa 3 kali kerja. Dan itu kenyataan. Jadi saya pikir kita tidak mutlak menyalahkan orang karena kita juga salah. Dan seperti kata Pak Jasman dan Bapak tadi benar adanya. Baru-baru ini, saya punya teman yang sudah tinggal di Meulaboh tapi karena dia punya tanah di Rukoh dia meminta Keuchik mengukur tanahnya untuk dibangunkan rumah. Ini baru 2 hari yang lalu. Jadi saya pikir mengapa tidak kebutuhan rumah setiap hari bertambah. Ditambah lagi ada 1 orang yang mendapat 10 rumah karena banyak tanah. Jadi saya pikir data ini, seperti kata Pak Jasman, kayaknya memang sulit untuk dapat dipercaya apalagi dengan penambahan-penambahan yang semakin hari kian bertambah tapi juga kita tidak bisa menyalahkan BRR 100% barangkali karena kesalahan juga ada pada masyarakat kita.

Murizal Hamzah:

Saya wartawan, jadi wartawan di Banda Aceh bisa buat rumah tapi beli tanah dulu. Nanti BRR akan bangun rumah dan ini politik dari BRR. Kemudian bila saya punya tanah di Samalangga saya bisa bangun rumah di Samalangga. Jadi kalau ada tanah bisa buat rumah.

Nurjannah :

Tapi mungkin karena kebolehan-kebolehan seperti itu sehingga kebutuhan rumah membengkak. Jadi seorang yang betul-betul kena tsunami yang seharusnya bisa dapat malah tidak mendapatkan rumah.

Jasman J Ma'ruf:

Jadi begini, semuanya kembali pada moral. Ada orang yang memang moralnya baik, dia memang korban di tempat lain dan juga mempunyai tanah di tempat lain. Itu mungkin bisa saja. Nah, sekarang masalahnya orang yang bermoral baik itu sedikit sekali di bumi ini. Dia imam, bukan berarti moralnya baik. Imam artinya dia tahu ilmu agama tapi ketika dia berhubungan dengan kepentingan jadi lain lagi. Jadi kalau memang seperti itu kejadiannya, sediakanlah tanah bagi para korban. Tidak dimestikan bagi korban untuk membeli

tanah. Oleh karena itu sepatutnya setiap keputusan yang kita buat harus ada pertimbangan 7 keliling jangsan 1 keliling saja karena efeknya banyak. Kalau begini kejadiannya semua orang bisa melakukan hal yang macam-macam. Sekali lagi ini moral. Kecenderungannya sebagian besar masyarakat kita mau menipu. Nah, kalau itu betul terjadi maka kita masih perlu 300ribu rumah lagi. Padahal data tsunami rumah yang hancur hanya 100 ribu. Masalahnya adalah yang 100 ribu itu, orang yang meninggal hanya 50.000 yang punya rumah. Sedangkan yang lain mengaku kehilangan rumah walaupun rumahnya tidak hilang. Oleh karena itu, mungkin keputusan-keputusan yang strategic seperti itu, harus mempertimbangkan masak-masak apa antisipatifnya. Seperti yang dilakukan oleh Budha Suci. Coba lihat bagaimana dia menghadirkan sebuah rumah dengan kawasan yang bagus. Ohhh luar biasa sekali. Jadi maksudnya kalau sesuatu direncanakan dengan baik, mungkin tidak ada masalah dalam perumahan. Tapi sekali lagi karena kita kerja cilet-cilet, tidak tuntas.

Jeliteng Pribadi :

Jadi Bapak Ibu, insya allah tanggal 22 kita akan mengadakan acara bedah kasus dengan menghadirkan pihak BRR, deputi perumahan BRR dan juga rekan-rekan NGO dan donor yang terlibat pembangunan rumah di Aceh. Jadi kami meminta Pak Fahmi untuk bisa memaparkan kasus ini. Kami juga mengharapkan Bapak Ibu untuk bisa hadir di PP Cafe, sekalian makan siang bersama. Kita akan mendapatkan jawaban langsung dari BRR bagaimana semarutnya data ini. Nanti kita juga berusaha membekali Pak Fahmi dengan kisah-kisah yang kualitatif tadi. Tentang bobroknya pembangunan rumah. Jadi kita minta tanggapan mereka tentang fakta dan data yang kita dapat dilapangan. Sehingga setelah itu selesai, kita akan melakukan audiensi ke Bapel BRR dengan Pak Kuntoro dan juga dengan deputi-deputinya. Pak Humam sendiri nantinya akan langsung bicara sendiri dengan Pak Kuntoro. Jadi Bapak-bapak mewakili pokja ARF, jadi kita berusaha menemui Pak Kuntoro dan meminta langsung jawabannya mengapa pembangunan rumah semraut. Saat ini kita baru melihat dari satu sisi yakni angka yang kita terima dari BRR yang masih sangat acak yang kemudian kita susun berdasarkan kabupaten seperti ini. Angka-angka masih menimbulkan tanda tanya karena kebutuhan rumah 15.000 tapi yang sedang dibangun misal 26.000, ini kan aneh.

Fahmi:

Data base BRR itu mempunyai kapasitas merekap per kabupaten. Dan database BRR itu bisa diakses tanpa internet di kantornya . Jadi sebenarnya dengan sistem yang ada mereka punya data per Kabupaten bahkan per Kecamatan, tidak akan kesulitan untuk merekap. Angka 57.000 dari mana?

Jasman J Ma'ruf

Deputi perumahan BRR kerjanya apa saja? Maksud saya begini. Ketika dia menjabat sebagai deputi perumahan, dia tidak hanya memikirkan tentang perumahan yang harus dia lakukan. Akan tetapi dia juga harus melihat, ini kan rehab rekons jadi secara keseluruhan. Mana yang harus saya buat, kalau dia ingin langsung buat tidak apa-apa. Ketua deputi perumahan harus memiliki pemahaman yang cukup baik tentang rumah-rumah yang akan dibangun oleh NGO. Supaya ada isi saat kita melakukan audiensi, harus ada persiapan. Apa-apa saja yang perlu diutarakan. Dan saya dengar, kita harus tantang Kuntoro. Kalau nanti kita audiensi kita harus tanyakan kapan masalah perumahan ini bisa selesai?

Jeliteng Pribadi:

Tahun lalu kita observasi ke lapangan, jumlah rumah yang dibangun NGO ternyata sudah mendekati penutupan. Angka pastinya saya sudah lupa. Alih-alih BRR menambah 95 unit rumah lagi. Ini terjafdi di Tibang.

Yusuf Azis:

Kini yang perlu disinggung adalah rumah dengan perumahan karena yang selama ini dibangun baru rumah saja sedangkan perumahan baru di Lambung. Jadi hal ini perlu diangkat lagi karena masih ada 2,5 tahun lagi. Jadi rumah-rumah yang belum dibangun bisa lebih baik lagi. Jadi nanti kita rekomendasikan pada BRR agar tidak lagi membangun rumah tetapi membangun perumahan.

Jeliteng Pribadi:

Baik, jadi ini bisa dikatakan brain storming awal mengenai kondisi perumahan yang ada. Nanti ada badah kasus tanggal 22, kita dapat jawaban jelas dari BRR, NGO dan juga donor. Kita juga mengundang kontraktor-kontraktor mengapa pembangunannya bisa sangat terlambat. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran bapak Ibu dalam kegiatan bedah kasus nanti.

Topik
Menyikapi Kendala Pembangunan Perumahan Bagi Korban Tsunami
Hari/Tanggal
Rabu, 28 Pebruari 2007
Pukul
19:30 wib – selesai
Tempat
Sekretariat ARF
Peserta
Humam Hamid, Saifuddin Bantasyam, Meksalmina (Pokja
Infrastruktur dan Perumahan), Jasman J. Ma'ruf, Akhiruddin
Mahyuddin (Pokja Ekonomi), Yusuf Aziz, Nurjannah (Pokja
Pendidikan), Mawardi Ismail (Pokja Kelembagaan dan Penguatan
Pemerintahan) Mohd. Daud Yoesoef (Pokja Perdamaian), Jeliteng
Pribadi, Catur Wibowo, Renny Wahyuni, Miksalmina (ARF),
Ados (Aceh Magazine)

Pembukaan oleh Jeliteng Pribadi

Sebagaimana biasanya dalam setiap bulan kita mengadakan pertemuan rutin untuk membahas segala persoalan yang berhubungan dengan rehab dan rekons Aceh. Untuk topik yang sudah kita sepakati malam ini adalah perumahan. Ada ketidaksinkronan data dengan yang terjadi di lapangan. ARF menemui adanya *over supply* di berbagai desa, semntara di desa lain justru kekurangan. Kita berjanji akan menjumpai Pak Kun untuk masalah perumahan ini, ide saya sebelum kita jumpai beliau, mungkin kita akan melakukan *field visit* ke beberapa desa sebagai sampel guna mendapatkan berbagai informasi. Miksal akan menjelaskan beberapa hal mengenai data perumahan yang sudah coba kita verifikasi.

Verifikasi data kuantitatif oleh Miksalmina

Target pembangunan rumah tahun 2005 sebesar 32.000 unit, tetapi yang realisasi hanya 16.200 unit atau 54%. Target pembangunan rumah tahun 2006 sebesar 78.000 unit, namun yang terealisasi hanya 34.841 unit rumah atau 45%. Sampai awal 2007, BRR menyatakan di berbagai media massa dan dimasukkan dalam laporan setahun dan dua tahun BRR, bahwa jumlah rumah yang sudah dibangun sebesar 74 ribu. Padahal verifikasi data mentah per 5 Januari yang bersumber dari Pusat Data BRR, diolah oleh ARF ternyata hanya 51.041 unit.

Berdasarkan verifikasi ARF di lapangan dengan sample sebanyak 20 desa di Banda Aceh dan Aceh Besar, dengan mewawancarai Keuchik di masing-masing desa, terdapat beberapa desa yang memiliki rumah bantuan lebih daripada kebutuhan yang ada.

Akhiruddin

Selain *over supplay* dan rumah yang terbengkalai, ada juga permasalahan lain yaitu masa kontrak sudah selesai tetapi pembangunan fisik tidak terlaksana. Contoh di Seumelu, kontrak sudah selesai, tetapi tidak dilaksanakan oleh kontraktor. Sementara harga satu rumah Rp 90 juta. Ini menunjukkan indikasi lemahnya pengawasan BRR.

Masalah-masalah lainnya seperti penerima rumah ganda. Ada 145 orang yang menerima lebih dari satu (Kami punya datanya di GeRAK), korban yang terpaksa menyewa rumah, kontraktor lari, dan Sertifikasi tanah perlu diverifikasi. Tidak adanya tindakan tegas dari BRR menimbulkan disinsentif kepada kontraktor lain.

Masalah kualitas rumah perlu ditindaklanjuti, misalnya apa yang terjadi di Lamnga dll. Village planning sudah dilakukan dan logikanya tidak mungkin terjadi bisa *over supply*. Kalau inipun terjadi maka tidak ada koordinasi antara BRR dengan village planning. Jadi sia-sia saja village planning yang telah dibuat. Rencana jalan sendiri, pelaksanaan sendiri. Ada beberapa hal yang bisa dilihat, antara lain masalah tanah. Kebutuhan tanah per 2005 sebanyak 7200 persil. Sebenarnya BRR sudah memiliki dana untuk ini. Ini artinya tidak ada koordinasi antara BRR, pihak yang membuat DED (yang juga dibiayai BRR), dan village planning yang juga dibiayai BRR. Contoh DED Aceh Besar.

Jeliteng Pribadi

Banyak sekali permasalahan rumah yang belum ada follow up nya. Maka kita nanti akan berusaha menggabungkan apa yang sudah kita temui dengan hasil yang ditemui oleh Akhiruddin.

P Mawardi

Ada beberapa point yang saya mau tanyakan:

1. Data yang dimiliki ini harus betul-betul valid, jangan sampai ketika kita berhadapan dengan BRR, dan BRR menunjukkan datanya, kita menjadi kalah.
2. Data yang ditampilkan pertama, yakni data tentang komitmen. Perlu ditambahkan sisa yang dibutuhkan dan siapa yang akan membangun.
3. Bila kita lihat data ini, betul-betul menimbulkan tanda tanya. Misalnya, Data di Desa Paya Tieng yang dibangun Mercy Corp 16, tetapi verifikasi 0. Contoh lagi tentang kontraktor yang lari di desa ... yang dilansir di koran, dimana pembayaran sudah dilakukan 100%. Kenapa ini bisa terjadi? Data-data ini harus dicross check validitasnya.
4. Juga ada rumah yang sudah selesai tapi tidak bisa dipakai.
5. Kalau yang ditinggalkan kontraktor uangnya belum dibayar, ini tidak masalah, tetapi kalau yang sudah dibayar 100% ini baru masalah.
6. Jika rumah sudah selesai, tetapi rumah tidak diserahkan, ini tidak mengapa, karena barangkali pembayarannya belum selesai.
7. Di Punge Blang Cut, data BRR 175, verifikasi 160, selesai BRR 175, verifikasi ketimpangan-ketimpangan yang bersifat mikro bisa kita paparkan dalam audiensi ini dan ini bisa menjadi kasus.

Humam Hamid

Perlu dilakukan verifikasi data yang ada.

Yusuf Aziz

Ada indikasi data kita meragukan, misalnya di Baet, yang BRR Nias, perencanaan 118, verifikasi 188, yang selesai 118.

Saifuddin Bantasyam

Kalau pertemuan pada malam ini dimaksudkan untuk menghimpun isu-isu yang akan dibicarakan ARF ketika bertemu dengan Pak Kuntoro, maka yang dikatakan Pak Mawardi dan Pak Yusuf menjadi PR bagi ARF. Satu data rumah salah, maka bisa menjadi senjata BRR untuk menyerang balik ARF. Beberapa hal yang dinyatakan tadi menjadi case, saja. Saya sangat khawatir agar jangan sampai menjadi blunder. Satu dua orang, sudah membuat blunder, tetapi tidak ada tindak lanjut.

Kedua, kembali ke tujuan awal dari agenda pertemuan kita ini, kita perlu melist agenda. Misalnya: simpang siur data perumahan. ARF prihatin terhadap kesimpang siuran data-data yang tidak sesuai dengan fakta lapangan. Ada tidak statemen lain dari data ini.

Ketiga, bisa tidak data ini menjamin, kualitas perumahan yang dibangun BRR benar-benar jeblok. Bisa tidak, dikatakan bahwa pembangunan rumah diakibatkan oleh BRR semata atau karena kontraktor. Kita berharap, kita bicara tidak hanya Banda Aceh dan Aceh Besar. Kita juga perlu bicara daerah lain, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, dll. Atau kita perlu membatasi diri untuk dua daerah ini dulu.

Menurut saya, forum malam ini, harus mencoba memberikan statement-statement yang diakibatkan oleh data aneh ini. Atau kita buat itemnya apa, dan apa yang kita inginkan untuk dilakukan BRR. Bila perlu tembak saja deputinya. Minggu lalu, ARF sudah mengeluarkan rilis, jadi perlu diforward melalui email tentang item-item yang akan kita sampaikan kepada BRR. Jika ingin membuat merah mukanya, maka tidak perlu kita sampaikan. Jika kita ingin pertemuan berjalan.

Di sini ada beberapa keterangan: misalnya kualitas rumah tidak memuaskan, jika betul, kita harus ambil dokumennya.

Fauzi Ali Amin

Apa indikator rumah tidak memuaskan? Apakah bahan, material, atau kontraktor? Kita harus tau itu.

Jeliteng Pribadi

Ada 300-an desa dari data mentah yang over supply. Dari data yang ada, sebagian besar dikarenakan BRR ikut membangun rumah, padahal rumah di desa tersebut sudah cukup. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada pemetaan rumah dari BRR. Kedua, koordinasi (BRR dan NGO) dan pengawasan sangat lemah.

Yusuf Aziz

Jika kriterianya yang kurang puas dan puas itu seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan justifikasi kepada BRR tentang bagaimana yang dianggap memuaskan bagi masyarakat.

Saifuddin Bantasyam

Jika permasalahan puas-tidak puas terlalu rumit, kita tidak usah singgung.

Humam Hamid

Strategi media BRR, kalau kita tidak benar-benar siap, maka kita akan dihantam habis-habisan. Ini perang media. Data ini boleh kita pegang, tetapi tidak boleh ditunjukkan. Kita bisa angkat problem rumah dari berbagai jenis pembangunan yang dilakukan di lapangan. Kualitas, kelengkapan pembangunan perumahan (PSD), kontraktor lari malam. Ini disebutkan, dugaan saya, kalau BRR serius, mereka sudah punya buku itu. Kalau kita serius, kita akan sama seperti mereka. Kalau mereka rajin. Kita menggaet publik untuk mengetahui permasalahan pembangunan perumahan yang sedang dikerjakan BRR. Data ini hanya kita pegang, tetapi tidak untuk ditunjukkan. Pekerjaan mereka hanya itu, kita memiliki banyak pekerjaan lain.

Saifuddin Bantasyam

Ada 4 point yang bisa saya diskusikan untuk bahan kita jumpa Pak Kun. Yakni:

- simpang siur data
- koordinasi
- tanah yang dijadikan bangunan rumah, atau apa yang kita mau?

Pertanyaannya apa yang dimiliki ARF. Dicatat saya ada empat item sehingga lahir 10 atau 12. Lantas, apa yang kita harapkan dari BRR? Contoh: kita minta BRR mengganti staf yang menyuplai datanya. Kita perlu menyiapkan sebuah matriks. Sehingga kita bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat.

Akhiruddin

Untuk menilai kualitas rumah BRR, kita perlu pisahkan antara rumah yang dibangun BRR dan rumah yang dibangun NGO.

Kedua, perlu saya tambahkan format ini: yang dibangun di desa A, oleh PT apa? Sehingga kita akan mudah mengetahui dari KPPN apakah ia sub kon atau kontraktornya.

1. Dari mekanisme pencairan, semua proyek BRR 100 persen.
2. Mekanisme sanksi, BRR tidak memberlakukannya, misalnya mengikutsertakan kembali perusahaan yang pernah di black list.

Mawardi Ismail

Permintaan kita hanya satu: TOLONG JANGAN MAIN-MAIN DENGAN MASALAH INI, DAN TOLONG DIPUBLISH KE MEDIA MASSA.

Jasman J. Ma'ruf

Ada isu yang sedang hangat dan bisa kita tambahkan

- BRR menawarkan rumah bagi penyewa tapi harus sediakan tanah
- Masyarakat barak banyak penyewa jadi bagaimana kita mensikapinya
- Siapa yang bertanggung jawab dalam pembangunan rumah yang kurang?

Humam Hamid

Ini menarik. Pasca tsunami. Jika kita melihat data BPS, terjadi lonjakan jumlah penduduk pasca tsunami. Apakah returning IDPs atau migrasi?

Meksalmina

Ada isu tentang policy pembangunan: rehab (berat –ringan), rekon, relokasi, renter. Saya terfikir jika isu ini bisa diangkat. Misalnya banyak rumah yang tidak layak huni, apa yang dilakukan BRR. Up grading seperti apa?

Masalah daerah relokasi: saya dengar BRR akan bayar pembebasan lahan jika ada NGO yang mau bangun. Ada kesan BRR mempersulit permasalahan ini.

Akhiruddin

Apakah kita setuju dengan mekanisme bantuan uang tunai untuk membangun rumah?

Data ini juga memiliki kelemahan karena kita tidak bisa membandingkan data 2005 dan 2006. Kita ingin BRR memperbaiki informasi kepada publik. Itu harapan kita.

Meksalmina

- Bagaimana keterpaduan village planning dengan pembangunan rumah dalam pelaksanaannya.
- Bagaimana *complain mechanism* yang diterapkan BRR?

Saifuddin Bantasyam

Saya memiliki pengalaman adanya manipulasi data oleh masyarakat.

Humam Hamid

Ada upaya penghalang-halangan sistematis dari Pemerintah dalam hal relokasi. Bukti, pembuatan perumahan di ujung Batee, pengurusan tanahnya sampai setahun. Ini tidak di BRR, di BPN, di TK. II. BRR tidak sendiri. Kita perlu antisipasi tentang pengetahuan umum permasalahan pembangunan rumah.

Yusuf Aziz

Banyak developer lari malam. Dari pertemuan bedah kasus kita minggu kemarin, ada kesan BRR lari dari tanggung jawab.

Humam Hamid

Ini namanya strategi 'klo'. *Dipebangai-bangai dro.*

Akhiruddin

Sekarang ini sedang dibangun 700 village planning. Bagaimana keterkaitan village planning dengan pembangunan perumahan yang sedang dikerjakan saat ini. Jika village planning selesai belakangan, berarti dana ratusan juta tersebut tidak ada hasilnya.

Andi siswanto, menunjuk langsung perusahaannya yang membuat village planning senilai 26,1 milyar.

Mawardi

Konkritkan dulu yang ini, baru kita bicara yang lain-lain.

Saifuddin

Ada beberapa list yang ekspektasinya didukung data kalau kita buat pertemuan dengan Pak Kun:

1. Simpang siur data
2. Problem perumahan di atas tanah masyarakat
3. Problem rumah yang dibangun satu persatu dan dibangun dengan cluster
4. Mekanisme pencairan keuangan-> dibayar 100%
5. Mekanisme sanksi terhadap kontraktor/NGO dan petugas BRR nakal
6. Tanah rumah kepada penyewa
7. Yang bertanggung jawab terhadap rumah yang tidak ada komitmen
8. follow up lepada 5 kebijakan
9. complain mechanism
10. village planning

Ekspektasi nya apa dari ARF dan Kapan akan kita laksanakan?

Harapan agar disiapkan draft dan dibagi kepada seluruh peserta yang hadir malam ini.

ARF perlu melakukan verifikasi data ini dan mengupdatenya enam bulan kedepan, agar akhir tahun kita bisa menilai apakah BRR dapat menyelesaikan tugasnya atau

Penutupan

Saifuddin

Syukur alhamdulillah karena pertemuan ini dapat mengumpulkan beberapa hal yang akan kita ajukan dalam pertemuan dengan Pak Kuntoro, Saya minta agar Pak Jeliteng dan Miksal menindaklanjuti ekspektasi ini.

Lampiran 1.

VERIFIKASI LAPANGAN TIM ARF
SEKTOR PERUMAHAN

No	Desa/Kecamatan/Kab/Kota	Verifikasi
1.	Peulanggahan (Anggota KP4D, M. Isa, Ketua Lr. I)	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 30 unit selesai dari 80 unit yang dijanjikan oleh BRR (Tahap finishing diselesaikan oleh masyarakat sendiri) ➤ Sisa 50 unit lagi kini terbengkalai yang ditumbuhi rumput menjalar ke tiang besi cor rumah. <p>Tahun 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Masyarakat mengajukan kebutuhan rumah 143 unit ➤ BRR menyetujui 93 rumah ➤ 73 unit masih dalam proses pembangunan sementara ➤ 20 unit tidak jelas siapa yang akan mengerjakan <p>Tahun 2007</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR akan membangun rumah sebanyak 65 unit namun nama penerima bukan seperti permintaan masyarakat yang pernah diajukan tahun 2006 yang lalu
2.	Tibang (Keuchik)	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 30 unit rumah ➤ Rumah yang selesai 15 unit dengan kualitas yang tidak layak huni. <p>Tahun 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 69 unit rumah ➤ 27 unit sedang dalam proses pembangunan
3.	Punge Blang Cut (Keuchik)	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 175 unit rumah ➤ Ternyata BRR membangun 160 unit dengan kualitas yang tidak layak huni, tidak ada MCK dan dapur.
4.	Rima Keunerum (Keuchik)	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 92 unit rumah ➤ Rumah yang selesai 84 unit dengan kualitas yang tidak layak huni. ➤ Masyarakat membongkar rumah tersebut dan membuat kembali dengan biaya sendiri. Beberapa masyarakat mengikutinya namun bagi yang tidak mempunyai biaya, mereka masih menumpang. <p>Tahun 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 69 unit rumah ➤ 27 unit sedang dalam proses pembangunan
5.	Lambaro Nejib	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 60 unit rumah ➤ Rumah yang selesai 60 unit dengan kualitas yang tidak layak huni, mutu bangunan tidak kokoh dan serampangan. <p>Tahun 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BRR membangun 18 unit rumah ➤ 5 unit selesai dikerjakan oleh kontraktor dibantu masyarakat ➤ 13 unit ditinggal oleh kontraktor

6.	Neuheun	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebutuhan rumah dari Data BRR sebanyak 400 unit ➤ Korban tsunami hanya 30 KK ➤ 30 unit rumah telah selesai dibangun oleh AMURT dengan kualitas yang bagus ➤ Tanah di Desa Neuheun dijadikan tanah relokasi bagi para korban yang tidak lagi mempunyai lahan. Rencana akan dibangun 1.900 unit rumah. ➤ Yayasan Budha Tzu-Chi membangun perumahan sebanyak 1.000 unit ➤ China Charity 700 unit ➤ Rebuild Aceh 200 unit ➤ Kepala Desa Neuheun menginginkan dari 1.900 unit rumah yang akan dibangun di desanya, hendaknya bisa diberikan 400 unit rumah kepada masyarakatnya karena dilihat dari kondisi masyarakat Desa Neuheun yang hidupnya pas-pasan memang membutuhkan perumahan sebanyak 400 unit rumah dengan asumsi satu rumah ditempati lebih dari satu KK. ➤ Kepala Desa Neuheun (Jamaluddin) mengatakan dalam proses pembangunan rumah di desanya sebanyak 1.900 unit, ketiga NGO tersebut tidak melibatkan dirinya. Dia terlibat ketika hanya pembebasan lahan saja yang dilibatkan oleh Bupati, Camat dan NGO. ➤ Jamaluddin juga menyangkan statement NGO bahwa perumahan ini akan diserahkan oleh Pemda Aceh Besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang kekurangan rumah yang bukan korban tsunami di Desa itu.
7.	Blang Krueng	<p>Tahun 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan rumah diberikan oleh Islamic Relief sebanyak 150 unit ➤ 100 unit untuk perumahan (komplek dosen) ➤ 50 unit lagi untuk para janda ➤ Yang membedakan kedua perumahan ini adalah mutunya berbeda, untuk perumahan dosen mutunya bagus tapi untuk para janda kualitasnya buruk. ➤ Untuk dosen, tata letak begitu rapi dan bagus akan tetapi untuk para janda begitu semrawut ➤ Syakinah Raden (63) salah seorang yang mendapatkan batuan perumahan mengungkapkan selain rumahnya pada retak, dinding pembatas dapur telah roboh dikarenakan tangannya menempel pada dinding. ➤ Ruhamah (65) mempunyai keluhan yang sama untuk kualitas rumah. Seng rumahnya tidak tertempel dengan baik pada kayu seng sehingga bila hujan yang diikuti dengan angin yang kencang maka sepertinya seng akan copot. Tidak hanya itu, dinding rumah masih labil juga pintu yang renggang.
8.	Paya Tieng	<p>Tahun 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebutuhan perumahan di Desa Paya Tieng sebanyak 350 unit rumah ➤ Uplink telah menargetkan bantuan perumahan sebanyak 180 unit ➤ 150 unit telah ditempatkan selebihnya sebanyak 30 unit sedang finishing. ➤ BRR membangun rumah sebanyak 7 unit ➤ Semua telah rampung dengan kondisi yang tidak begitu sempurna dan tidak layak huni. <p>Tahun 2006</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sisa 163 unit belum ada kejelasan siapa yang akan membangun

Lampiran 2.

**Bahan Audiensi Terhadap Tim Pansus DPRA
Permasalahan dan Harapan Civil Society Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Korban Tsunami**

No	Permasalahan	Indikasi	Ekspektasi
1.	Keraguan terhadap komitmen dan kapasitas BRR NAD-Nias dalam <i>manage</i> pembangunan rumah korban tsunami	Tahun 2005, BRR NAD-Nias menjanjikan akan membangun 32.000 unit rumah bagi korban tsunami di Aceh, tetapi hanya 16.200 unit (54%) yang berhasil direalisasikan ¹ . Tahun 2006, BRR menargetkan akan membangun 78.000 unit namun yang terealisasi hanya 34.841 unit rumah (45%). Tahun 2007, BRR kembali menargetkan akan menyelesaikan 128.000 rumah (100%) dan memindahkan seluruh penghuni Barak yang berjumlah 14.300 KK ² .	DPRD sebagai wakil rakyat hendaknya bisa melakukan tekanan kepada BRR agar tidak perlu mengumbar janji-janji dalam membangun rumah korban tsunami, tetapi berikan bukti.
2.	Simpang siur data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data BRR NAD-Nias menyebutkan hingga Desember 2006 sudah terbangun sebanyak 12.933 unit rumah untuk korban tsunami, dimana 9.412 dibangun di Aceh, sedangkan sisanya dibangun di Nias³. Selanjutnya, Kepala Bapel BRR NAD-Nias mengatakan bahwa jumlah rumah yang sudah dibangun di Aceh sampai akhir Desember 2006 sebanyak 57.000 unit dan sampai Maret 2007 akan selesai sekitar 22.000 unit lagi⁴. Pada waktu lain, Kepala Bapel BRR NAD-Nias mengatakan BRR sudah berhasil membangun 70.000 rumah⁵. 2. Hasil verifikasi ARF menunjukkan bahwa jumlah rumah yang sudah selesai dibangun di Aceh per 1 Januari 2007 hanya 51.041 unit dan 8.128 unit sedang dikerjakan oleh berbagai pihak. (Lihat lampiran 1) 3. Permasalahan Data Perumahan a.l.: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan rumah fiktif. (Ada dalam laporan, tapi tidak ada di lapangan) b. Rumah tidak terdata c. Informasi pembangunan rumah yang salah d. Rencana pembangunan lebih besar dari kebutuhan e. Jumlah dibangun lebih besar dari rencana (Untuk lebih jelas, dapat melihat lampiran 2 dan 3) 	<p>DPRD bisa melakukan verifikasi data yang dipunyai oleh BRR sehingga tidak ada lagi kesimpangsiuran data, apalagi untuk data-data yang diragukan/fiktif.</p> <p>DPRD juga hendaknya mempunyai laporan kemajuan pembangunan rumah serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi target pencapaian rumah.</p>

¹ BRR NAD – Nias (2005). Aceh and Nias one year after the tsunami

² Joko Banar (UNORC-BAFO). Partners and Stakeholders Meeting ARF, 29 Januari 2007

³ Republika, 03/12/2006

⁴ Serambi Indonesia, 26/01/2007

⁵ Sinar Harapan, 19/02/2007

3.	Koordinasi BRR dengan pelaku pembangunan perumahan sangat buruk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan rumah fiktif. (Ada dalam laporan, tapi tidak ada di lapangan) 2. Rumah tidak terdata: rumah sedang dan sudah selesai dibangun, tapi tidak terdata di BRR. 3. Informasi pembangunan rumah yang salah. Pembangunan balai pertemuan dilaporkan sebagai pembangunan rumah. (Lihat lampiran 2 dan 3) 	DPRD hendaknya dapat memverifikasi dan meng-up date data perkembangan rehab-rekon (khususnya perumahan) secara rutin.
4.	Rumah yang dibangun mengecewakan korban	<p>Beberapa kasus yang ditemukan di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar a.l:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rumah ditelantarkan : di Desa Peulangahan b. Pembangunan lambat: di Desa Tibang, Punge Blang Cut, Rima Keunerum c. Kualitas rumah jelek: di Desa Tibang, Punge Blang Cut, Rima Keunerum, Lambaro Neujib, Blang Krueng, Paya Tieng. (Lihat lampiran 4) 	DPRD juga hendaknya menekan BRR NAD-Nias untuk menindak kontraktor yang menelantarkan rumah dan memberi sanksi terhadap kontraktor terlambat dari jadwal dan tidak sesuai kontrak. Juga menindak petugas BRR yang bertanggung jawab untuk itu.
5.	Tanah/rumah bagi penyewa	<ol style="list-style-type: none"> a. Tawaran terhadap masyarakat yang memiliki tanah untuk dibangun rumah tanpa mempedulikan ia korban tsunami atau tidak, rumahnya hancur atau tidak. (Lihat lampiran 4) 	DPRD perlu meminta klarifikasi dari BRR.
6.	Tanah/rumah bagi penyewa	<ol style="list-style-type: none"> a. BRR menjanjikan akan membangun rumah bagi para korban dengan status penyewa⁶. "Para korban tsunami yang sebelumnya berstatus sebagai penyewa rumah, akan diberikan bantuan rumah tipe 21", kata Deputi Perumahan BRR. Keputusan ini diambil karena penyewa rumah yang menjadi korban bencana tsunami yang hingga kini masih tinggal di barak dan shelter lebih memilih bantuan rumah dibandingkan dengan bantuan uang sewa rumah. Rumah ini akan diberikan setelah tim pemeriksa memastikan bahwa calon penerima benar-benar korban tsunami dan tidak mampu membeli tanah dan membangun rumah b. Status tanah dan rumah bagi penyewa masih simpang siur walaupun janji sudah diberikan oleh BRR c. Kasus yang didapati oleh tim data adalah: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Korban tsunami yang berstatus penyewa dan kini mengungsi ke barak di Desa Cot Kilat Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar mengatakan pembagian perumahan saat ini yang diprioritaskan adalah bagi korban-korban tsunami yang memang dulunya memiliki tanah dan tempat tinggal. Menurut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh- Nias "Syarat untuk mendapatkan 	ARF meminta DPRD untuk segera melakukan follow up kepada BRR agar sesegera mungkin memberikan bantuan rumah permanen kepada masyarakat korban yang statusnya penyewa agar target penghapusan masyarakat barak bisa tercapai di tahun 2007 ini.

⁶ Serambi/25-1-2007

		<p>rumah harus ada tanah, jadi para penyewa sulit untuk memperolehnya”⁷.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Namun, ada juga kasus yang sudah ada kejelasan bagi para penyewa untuk mendapatkan tanah dan rumah. ❖ Sudah ada relokasi kepada para korban tsunami yang berstatus penyewa ke Desa Neuheun Kecamatan Baitussalam Aceh Besar, Desa Labui Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh dan Desa Nusa Kecamatan Lhoknga Aceh Besar. 	
7.	Penanggung jawab penyedia rumah di desa yang tidak ada/minus komitmen donor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa desa yang ada di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar masih banyak yang belum ada pembangunan rumah. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kota Banda Aceh <ul style="list-style-type: none"> ➢ Desa Lampaseh Aceh Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tercatat kebutuhan sebanyak 500 unit namun belum ada rencana BRR atau NGO untuk membangun rumah di desa tersebut.⁸ ➢ Desa Kota Baru Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh tercatat kebutuhan sebanyak 222 unit namun belum ada rencana BRR atau NGO untuk membangun rumah di desa tersebut.⁹ ❖ Kabupaten Aceh Besar <ul style="list-style-type: none"> ➢ Desa Beuradeun Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar tercatat kebutuhan sebanyak 18 unit namun belum ada rencana BRR/NGOs untuk membantu pemenuhan kebutuhan rumah tersebut.¹⁰ 2. Sebagian desa mendapatkan rumah dari tapi masih kurang <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kota Banda Aceh <ul style="list-style-type: none"> ➢ Desa Punge Jurong Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tercatat kebutuhan sebanyak 918 unit namun rencana BRR atau NGO untuk membangun rumah di desa tersebut hanya 654 sehingga terjadi kekurangan rumah sebanyak 264 unit.¹¹ ➢ Desa Blang Oi Kecamatan Meuraxa Banda Aceh tercatat kebutuhan 675 unit, rencana dari BRR dan NGO 459 unit. Kekurangan 216 unit.¹² 	ARF minta kepada DPRD agar bisa memberikan arahan kepada BRR untuk segera menutupi kekurangan rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai ada desa yang terjadi over supply sedangkan yang lain kekurangan.

⁷ <http://hinamagazine.com/index.php/2006/10/27/korban-tsunami-berstatus-penyewa-khawatir-tidak-mendapatkan-rumah>

⁸ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

⁹ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

¹⁰ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

¹¹ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

¹² Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh tercatat kebutuhan 818 unit, rencana akan dibangun dari BRR dan NGO 651 unit. Kekurangan 167 unit.¹³ ❖ Kabupaten Aceh Besar <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mns. Lambaro Kecamatan Lhoknga Aceh Besar tercatat kebutuhan 175 unit, rencana akan dibangun 30 unit namun masih kurang 145 unit.¹⁴ ➤ Klieng Cot Aron Kecamatan Baitussalam, tercatat kebutuhan 550 unit, rencana akan dibangun 374 unit namun masih kurang 176 unit.¹⁵ 	
8.	Sejauh mana follow-up BRR terhadap 5 kebijakan BRR tentang perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan relokasi, rehab ringan, rehab berat, rekons, renters. Beberapa temuan yang didapati oleh tim data: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Relokasi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban tsunami di Desa Neuheun yang tanahnya hilang direlokasikan ke Desa Neuheun yang tidak terkena tsunami ❖ Rehab Ringan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban tsunami di Desa Prada, Bandar Baru, Jeulingke, yang terkena tsunami mendapatkan bantuan rehab rumah ❖ Rehab Berat <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban tsunami di Desa Lambaro Skep, Lamdingin, Lampulo, yang terkena tsunami mendapatkan bantuan rehab rumah ❖ Rekonstruksi <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban tsunami di Desa Lampoh Daya, Kajhu, Ulee Lheu mendapatkan rumah bantuan baru. ❖ Renters <ul style="list-style-type: none"> ➤ Korban tsunami yang berstatus penyewa sebagian mendapatkan relokasi sedangkan sebagian lagi belum ada kejelasan. (Kembali pada point 7) 	ARF minta kepada DPRD untuk terus melakukan follow up dalam 5 kebijakan BRR tentang perumahan sehingga proses pembangunan rumah bisa cepat terselesaikan.
9.	Mekanisme Complain BRR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa keluhan yang diajukan oleh masyarakat kepada BRR banyak yang tidak ditanggapi. 2. Beberapa kasus yang ditemukan oleh tim data: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Di Desa Lamjame sebenarnya sudah mendapat bantuan rumah dari sebuah NGO bernama Up Link. Namun salah satu masyarakat desa tersebut terlambat mendaftar karena mengungsi ke tempat saudaranya. Karena tidak terdaftar sebagai penerima bantuan, maka disarankan oleh Keuchik untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ARF meminta kepada DPRD sebagai wakil rakyat agar bisa mensikapi berbagai keluhan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan bisa menyampaikannya kepada BRR 2. DPRD perlu meminta klarifikasi BRR tentang tindakan petugas yang meminta

¹³ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

¹⁴ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

¹⁵ Pusat Data dan Informasi BRR NAD-Nias, 2007

		<p>mengajukan permohonan ke BRR. Namun sampai saat ini belum juga mendapat bantuan rumah dari BRR, padahal sudah mengajukan permohonan sejak pertengahan tahun 2006 yang lalu. Ketika dikonfirmasi, pihak BRR mengatakan tidak bisa dibantu karena pengajuan permohonan tidak berkelompok sehingga mereka tidak menanggapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Salah seorang penghuni salah satu transitional shelter Posko Payung Desa Baet, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Menyatakan bahwa pihak BRR sudah meminta data-data mereka, Bahkan, ia juga diminta uang Rp 10 ribu untuk pendaftaran supaya dapat rumah BRR," akunya. Tapi sampai kini, janji dapat rumah itu tak kunjung juga terwujud.¹⁶ 	uang dari pengungsi.
10.	Keterpaduan antara village planning dengan pembangunan perumahan dan pemukiman saat ini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Village planning telah mulai dibuat pada tahun ... dan harus selesai pada tahun... dengan konsep participatory planning 2. Village planning concept merupakan dasar bagi pembangunan perumahan namun dalam pelaksanaan di lapangan, konsep ini banyak yang tidak dijalankan oleh NGO dan BRR sendiri. Beberapa kasus yang didapati oleh tim data adalah: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dimana masyarakat disuruh membuat village planning namun pembangunan perumahan terus dilakukan bersamaan dengan perencanaannya. Sehingga village planning yang ❖ Desa Lampoh Daya Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar juga sedang melakukan village planning namun pembangunan rumah sudah hampir selesai. 3. Kalau ini yang terjadi, maka pembangunan perumahan bagi korban tsunami yang telah dikerjakan berdasarkan apa? 	ARF meminta kepada DPRD untuk bisa melakukan follow up dalam village planning dan bagaimana keefektifitasannya terhadap pelaksanaan pembangunan rumah dan sesegera mungkin menyampaikannya kepada BRR

¹⁶ <http://www.mediacenter.or.id/news/31/tahun/2006/bulan/12/tanggal/26/id/1476/>

Lampiran 3.

Matrik Pencapaian Program
Pebruari 2007

Kegiatan	Rencana	Realisasi	Bukti	Kaitan ke objective	Bukti	Pembelajaran	
						Positif	Negatif
1.1. Meetings of members on future directions for Aceh recovery & reconstruction.							
1.1.4 co-chair meeting	2 kali sebulan	Terpenuhi 100%. Senin, 12 Pebruari 2007 dan Rabu, 28 Pebruari 2007	Laporan Bulanan Co-chair meeting. Notulensi meeting formal.	Mengupdate dan membekali co-chair pokja ARF tentang status pembangunan perumahan bagi korban tsunami di Aceh, khususnya Banda Aceh dan Aceh Besar	Laporan Bulanan Co-chair meeting, Notulensi, Tabel Pembangunan Rumah, dan Matrik Rekomendasi Co-chair	Rekomendasi Pokja ARF tentang pembangunan perumahan disambut baik oleh Tim Pansus DPR Aceh dan Media Massa	-